

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Lembaga Pelaksana Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	16
1. Mahkamah Agung	16
2. Mahkamah Konstitusi	20
3. Dampak Pelaksanaan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di dalam 2 Lembaga yang berbeda	24
B. Fungsi Representasi dalam DPD	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian	32

B. Jenis Data dan Cara Memperoleh Data.....	34
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	37
D. Anaisis Data	38
E. Jalannya Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	40
A. Pengaturan Mengenai Pencalonan Anggota DPD Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomot 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomot 65P/HUM/2018.....	40
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	43
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	49
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	52
B. Mendudukan Pertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomot 65P/HUM/2018 terhadap pencalonan anggota DPD dari pengurus Partai Politik	56
1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 terhadap Pencalonan Anggota DPD dari Pengurus Partai Politik pada Tahapan Pemilu2019.	56
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018	64
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018	76

4. Analisis Pencalonan Anggota DPD dari Pengurus Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 87

BAB	V
PENUTUP	10
6	
A. Kesimpulan	10
6	
B. Saran	10
7	
DAFTAR	
PUSTAKA	10
9	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kronologis Dinamika Pencalonan Anggota DPD dari pengurus Parpol pada tahapan Pemilu 2019	56
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----